



P E N E T A P A N

Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 14 Januari 1963/ umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bebas, bertempat tinggal di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 31 Desember 1972/ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Nik : ***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 15 Januari 2007
Umur : 17 tahun, 12 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
Nik : ***

Tempat, tanggal lahir : Karamaka, 05 Juni 2003
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp.3.500.000 (tiga juta limaratus ribu rupiah)
Tempat kediaman di : ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Nomor: 463/069/XI-2024/DP3AKB-PUSPAGA, pada tanggal 28 November 2024;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Batu Ampar calon pengantin wanita dinyatakan sehat dan saat ini tidak dalam keadaan mengandung (Negatif);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **PEMOHON I** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **ANAK PARA PEMOHON**;
7. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** berstatus perawan dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** berstatus jejak dan sebagai calon suami **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 1337/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2024, tanggal, 12 November 2024;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suami bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dengan menghadirkan pula anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon agar menanggukuhkan kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya hingga dengan batas umur yang diperbolehkan menurut Undang-Undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat :

1. Usia anak para Pemohon yang masih dalam masa pendidikan,
2. Kesiapan organ reproduksi anak para Pemohon yang belum matang;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak para Pemohon, dan;
4. Potensi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap meneruskan Permohonannya dengan alasan:

1. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab hingga sering berjalan berdua;
2. Bahwa para Pemohon tidak dapat melakukan pengawasan kepada anak para Pemohon dan calon suaminya sehingga khawatir akan membuat anak para Pemohon dan calon suaminya melanggar ketentuan norma agama dan norma susila yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, dan calon suaminya yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah saling kenal, saling menyukai dan mencintai satu sama lain, kehendak untuk menikah adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga telah menyetujui keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan para Pemohon telah menerima lamaran dari orang tua calon suami anak para Pemohon. Bahwa pihak keluarga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dengan nomor NIK ***, atas nama ***, nomor NIK ***, atas nama ***, nomor NIK *** atas nama ***, nomor NIK ***, atas nama ***, nomor NIK ***, atas nama ***, nomor NIK ***, atas nama ***, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga *** (Pemohon I) Nomor *** tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon atas nama *** dengan Nomor 03229/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon Nomor DN-16/D-SMP/K13/0034927 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah *** bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama *** Nomor 7304-LT-20012020-0090 tanggal 10 Mei 2021, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jeneponto, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMA atas nama *** Nomor DN-19/M-SMA/K13/0054149 tanggal 5 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah *** bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor 1337/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 6 November 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batu Ampar, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi/ Hasil Konseling Psikolog Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 463/069/XI-2024/DP3AKB-PUSPAGA tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh DP3AKB, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk mendapatkan Dispensasi Kawin

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sudah seharusnya diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh para Pemohon yang tidak lain adalah orang tua dari pihak perempuan atau calon pengantin yang belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata hadir menghadap secara *in person*, pada saat yang sama para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon agar rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ditangguhkan hingga batas usia anak para Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat permohonannya yang telah dibacakan di depan persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah didengar pula keterangan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya ialah anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan pengakuannya bahwa kehendak untuk menikah tersebut

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kemauannya sendiri dan bukan karena paksaan dari pihak mana pun. Orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan seluruh keluarga calon suami anak para Pemohon setuju akan rencana pernikahan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran, saling cinta mencintai, sangat akrab dan telah menyatakan kehendaknya untuk menikah, sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena para Pemohon tidak dapat selalu memberikan pengawasan kepada anaknya tersebut sehingga dikhawatirkan akan melanggar norma agama maupun norma susila dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan surat **Nomor: 1337/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2024, tanggal, 12 November 2024** menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.9, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, Pasal 301 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk terdaftar pada Kota Balikpapan dan merupakan orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa *** adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama *** telah menyelesaikan sekolahnya di SLTP Negeri 15 Balikpapan dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan telah tamat sekolah SMA pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas Batu Ampar dengan hasil "sehat" dan mendapatkan konseling dari Psikolog DP3AKB;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Balikpapan Utara, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas umur minimal pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun, ketika perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 21 Tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
4. Bahwa keinginan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah didasari atas kemauannya atau persetujuannya sendiri dan atas hubungan suka sama suka, bukan paksaan dari pihak mana pun;
5. Bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tersebut telah mendapatkan restu baik dari keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon;
6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menyebabkan anak para Pemohon haram menikah dengan calon suaminya tersebut;
7. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, bahkan sering berjalan berdua sehingga para Pemohon merasa khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama dan norma;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
10. Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk mendukung anak para Pemohon dan calon suaminya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berpendapat bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah ternyata belum memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan, karena telah ternyata usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan Pasal 6 ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah didasari atas dasar suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah atas dasar persetujuan keduanya maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon beserta keluarganya dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya diberikan solusi atas keadaannya tersebut sehingga kekhawatiran para Pemohon sebagai orang tua tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemah :*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,*

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu untuk merujuk kepada Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

٩١٠/١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. (Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ibnu Hajar al 'Askalani hadist nomor 910)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini maka Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon pengantin bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon pengantin, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon pengantin, hal

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut sangat beralasan dan dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 147.700,00 (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik dan pada hari itu juga penetapan tersebut telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	2.700,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 147.700,00

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 536/Pdt.P/2024/PA.Bpp